



Polisi Komitmen Bongkar Korupsi Bansos

PONTIANAK, TRIBUN - Polda Kalbar tetap melanjutkan penyidikan dugaan korupsi melalui bantuan sosial Kalbar yang dialokasikan melalui anggaran tahun 2006-2008.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan segera diketahui," kata Direskrimsus Polda Kalbar Kombes Widodo melalui Kasubdit Tipidkor Kopol Permadi Syahid Putra, Senin (14/4).

Ia melanjutkan, berdasarkan ekspos terakhir mengenai kasus tersebut, ada beberapa penambahan berita acara pemeriksaan. "Selaku penyidik, kami merasa dapat memenuhinya," kata dia.

Selama ini, kelanjutan dari kasus tersebut terhambat di perhitungan

kerugian keuangan negara. Mengenai tersangka, ia menambahkan ada dua yakni atas nama ZL dan UJ yang berstatus anggota DPR RI dan kembali maju pada Pemilu Legislatif 2014. Namun, kata dia, baik keduanya belum pernah diperiksa dengan status sebagai tersangka.

Terungkapnya kasus Bansos ini bermula dari hasil audit reguler yang dilakukan BPK Perwakilan Kalbar terhadap Laporan Keuangan Pemprov tahun anggaran 2008, termasuk dana Bansos tahun 2006 hingga tahun 2008.

BPK memutuskan tidak menyatakan pendapat alias disclaimer opinion (DO) karena tidak meyakini beberapa kelompok penggunaan anggaran, di antaranya penggunaan dana Bansos untuk KONI.

BPK Perwakilan Kalbar juga telah membentuk tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan hasilnya mengindikasikan adanya kerugian negara berupa empat penggunaan Bansos bermasalah.

Yaitu temuan dana Bansos untuk KONI Kalbar dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan, yang digunakan untuk menalangi pinjaman pimpinan dan beberapa anggota DPRD Kalbar kepada Sekretariat Daerah sebesar Rp 10,07 miliar.

Kemudian pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada Satgas PrapON sebesar Rp 1,368 miliar yang tidak dipertanggungjawabkan.

■ **Bersambung ke Hal. 15**

Polisi Komitmen Bongkar Korupsi

Sambungan Hal. 9

Selanjutnya ada pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI Kalbar kepada Satgas Pelatda PON XVII sebesar Rp8,59 miliar serta adanya ketekoran kas KONI Kalbar tahun 2009 yang terin-

dikasi kerugian daerah sebesar Rp 2,114 miliar.

Polda Kalbar telah mengirimkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Tinggi Kalbar. "Ada lima SPDP dari

Polda Kalbar ke Kejati Kalbar," kata Aspidus Kejati Kalbar Didik Istiyanta.

Salah satunya mengenai kasus bantuan sosial oleh Pemprov Kalbar melalui APBD. (ant)